**BAB VI**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kami dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi adalah berkaitan erat dengan proses pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi memiliki beberapa dimensi antara lain adalah transformasi, kejelasan dan konsistensi. Hasil penelitian yang didapatkan di kabupaten Barru menjelaskan bahwa dimensi transformasi atau penyampaian kebijakan telah dilakukan dengan baik. Namun demikian bahwa para pelaksana kebijakan masih ditemukan adanya miskomonikasi pada level tertentu dalam organisasi sehingga komonikasi biasanya belum dipahami dengan baik para implementor dan hal ini juga yang ditemukan Pada Edwar III.

233

1. Sumber daya juga berkaitan erat dengan proses penataan dan pemerataan guru PNS. Sumber daya ada tiga hal yaitu: sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan sumber daya keuangan. Ketiga sumber daya tersebut dalam hal ini diartikan sebagai instrument atau alat yang mempermudah pelaksanaan implementasi kebijakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam peraturan lima menteri setiap daerah yang melakukan penataan dan pemerataan guru PNS diwajibkan membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaannya. Dalam proses penataan dan pemerataan guru PNS Kabupaten Barru telah memenuhi hal tersebut sehingga implementasi kebijakan terlaksana dengan baik, walaupun demikian peneliti juga menemukan bahwa sunber daya terutama sumber daya manusia masih sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas oleh karena itu penataan diharapkan untuk diperhatikan dengan baik oleh para pengambil kebijakan termasuk juga keterbatasan sumber pembiayaan untuk membiayai pendidikan yang lebih baik pada tingkat SD.
2. Disposisi juga sangat penting dalam implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru SD. Disposisi terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi aparat untuk melaksanakan kebijakan. Ketiga disposisi adalah kognisi, arahan atau tanggapan pelaksana, dan intensitas respon. Penataan dan pemerataan guru Sekolah Dasar di Kabupaten Barru terkait dengan faktor disposisi telah terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan bersama lima menteri. Pemahaman dan pengetahuan dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan cukup baik terhadap pelaksanaan kebijakan, tanggapan aparat pelaksana optimis dalam proses penataan dam pemerataan guru SD ini sangat baik karena adanya pertimbangan beberapa kepentingan peningkatan pelayanan pendidikan yang ada diwilayah Kabupaten Barru.
3. Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek penentu dari proses implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi yang dimaksud disini adalah mencakup tentang struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi yang ada dalam satu organisasi dan hubungan antar organisasi luar dimensi organisasi pelaksana. Struktur birokrasi sangat berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS di Kabupaten Barru. Implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS dapat berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS, namun demikian juga sering dirasakan Guru PNS Bahwa seharusnya ada mekanisme yang berjalan dengan baik untuk menyalurkan aspirasi terutama kepala sekolah memberi pertimbangan terkait penataan guru dan peningkatan kualitas guru akan tetapi karena tidak adanya struktur dan kejelasan kewenangan terkait dengan hal tersebut sehingga akan berpengaruh dalam penataan dan pemerataan guru pada tingkat SD.
4. **SARAN**
5. Diharapakan supaya komunikasi para penentu kebijakan dan Stekholder pendidikan di Kabupaten Barru tetap berjalan dengan baik. Karena komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan terutama implementasi kebijakan penataan dan pemerataan Guru benar-benar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan juknis.
6. Sumber daya juga diharapakan menjadi perhatian dan prioritas. Agar supaya guru diberikan kesempatan untuk menambah wawasan, dalam hal ini mengikuti pelatihan dan diklat fungsional guru, dan sebaiknya setiap pemangku kepentingan bersama masyarakat pro aktif untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan Bupati, sehingga bisa berjalan dengan baik.
7. Diharapkan supaya disposisi kewenangan kepada penentu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, terutama menyangkut implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS. Karena disposisi dalam Perbub ini dilakukan sebagai arahan dalam membuat suatu kebijakan, dan sebaiknya data guru setiap tahun dilakukan pendataan ulang yaitu memperbaharui berapa jumlah guru dalam sebuah sekolah untuk setiap kecamatan supaya mendapat data guru yang valid.
8. Struktur birokrasi dalam lembaga pendidikan diharapkan bersinergi dengan baik. Karena struktur birokrasi merupakan salah satu aspek penentu dari proses implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru SD di Kabupaten Barru.